

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI,  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL  
PENCARIAN PERTOLONGAN/BASARNAS)**

---

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Sidang	:	II
Rapat	:	Ke – 7
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Hari/Tanggal	:	Rabu, 26 November 2025
Sifat	:	Terbuka
Pukul	:	10.24 WIB s.d 13.35 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	:	1. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 2. Lain-lain
Ketua Rapat	:	Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	:	Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota	:	31 dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	:	Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat dibuka pada pukul 10.24.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum pada hari ini adalah Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 dan lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:**

1. Dalam rangka tindak lanjut penyelesaian rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) II Tahun 2024 BPK RI, Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar:
  - 1) Memperkuat peran pengendalian internal oleh Inspektorat Jenderal dan memperbaiki tata kelola pengawasan pembangunan sektor PU;
  - 2) Menerapkan Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) pada setiap infrastruktur yang dibangun dengan skema dan mekanisme pengawasan yang ketat;
  - 3) Menerapkan monitoring dan evaluasi berbasis *outcome* (*outcome based monev*) agar setiap kegiatan benar-benar menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat;
  - 4) Menyusun panduan rencana rinci yang komprehensif (*blueprint*) dan melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur termasuk bendungan;
  - 5) Melakukan antisipasi terhadap permasalahan sosial dari pembangunan infrastruktur.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU untuk :
  - 1) Memperbanyak Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan kegiatan Instruksi Presiden (Inpres) di sektor PU yang bermanfaat langsung bagi masyarakat;
  - 2) Melakukan upaya preventif dan penanganan terhadap infrastruktur yang terdampak bencana alam seperti banjir dan tanah longsor;
  - 3) Memprioritaskan penyedia jasa konstruksi lokal dalam keikutsertaan pada proyek-proyek infrastruktur.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 13.35.WIB.

Jakarta, 26 November 2025

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

**ttd**

**DODY HANGGODO**

**KETUA RAPAT,**

**ttd**

**L A S A R U S**